

PEMBERDAYAAN EKONOMI RAKYAT BERBASIS PESANTREN DI KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

Surya Supi¹

Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara

ABSTRAK

Pesantren are widely spread in Indonesia reaching to the most remote areas, hence have the potential to empower people's economy. Pesantren are involved in fostering self sufficiency among its members as well as the general society, which makes them a potential capital for empowering people's economy. Using the integrity and capacity to mobilize resources, Pesantren are an important source in efforts to increase community production and productivity. The study focuses on two pesantren: Nurul Fajri of pesantren and Kholidiyah of pesantren located in Hulu sungai utara regency,, as examples to evaluate the interchange and interaction between Islamic institutes / schools and the society. . Society benefits from the existence of pesantren through various services and products of its business units, which contribute to solving their economic problems, contribute to community capital through the nurturing and promoting of cooperatives and employment. In addition, in the context capacity development, peasantren education contributes to community rejuvenation and society development, instill values and norms of hardworking, diligence, commitment, which vital for harmonious human existence, self actualization, and development.

Keyword : *good governance, empowerment, people's economy, pesantren*

PENDAHULUAN

Peran berbagai organisasi massa dan lembaga non pemerintah dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*good governance*) untuk mencapai kesejahteraan bersama sangat penting, salah satu bentuk organisasi itu adalah pesantren². Membahas peran pesantren dan menghubungkannya dengan usaha mewujudkan *good governance* dan pemberdayaan sosial menjadi penting dan strategis. Penting karena mewujudkan *good governance* membutuhkan sinergi peran serta (partisipasi) tiap unsur *governance* dalam mewujudkan kesejahteraan bersama, termasuk dalam konteks ini peran pesantren sebagai bagian dari *civil society*. Strategis karena pesantren menyebar di seluruh wilayah Indonesia dan merupakan lembaga yang *survive* dan terbukti mampu menjalankan berbagai peran dalam setiap perkembangan kehidupan bangsa Indonesia.

Di sisi lain, Abdullah, dkk (2008: 1-6) mengkategorikan dua persoalan besar pesantren, yaitu eksistensi pendidikan Islam tradisional di tengah perkembangan pendidikan modern dan kemampuannya dalam menjaga kelangsungan proses pendidikan tersebut. Persoalan ini mencakup tantangan terhadap kemampuan pesantren memenuhi kebutuhan pengetahuan baik agama maupun pengetahuan dan keterampilan umum, kemampuan pesantren mencetak alumni yang dibutuhkan pasar khususnya tenaga kerja serta kemampuan pesantren untuk tetap *survive* dengan sistem pendanaan seadanya. Bentuk kontribusi atau tanggung jawab pesantren terhadap masyarakat bersifat nyata—termasuk tuntutan pasantren untuk mampu melakukan pemberdayan ekonomi masyarakat dan berkontribusi mengatasi masalah sosial.

1. Staf Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara

Telp: +62 85293055420

2. Banyak literatur yang membahas pesantren di Indonesia, antara lain Dhofier (1983), Ziemek (1986), Sriharini (2000), Zubeidi (2007), Departemen Agama RI (2003), Rahardjo (1895) maupun Matsuhu (1994). Berkaitan dengan tulisan ini, telaah Pesantren sengaja tidak dibahas secara mendalam. Dalam kajian ini Pesantren dipahami dalam konteks kelembagaan dan bertalian dengan pemberdayaan.

Sebagian tantangan dan tuntutan terhadap pesantren itu telah terjawab. Dilihat dari perkembangannya, secara nasional jumlah pesantren terus bertambah (Tabel 1). Pada pendataan tahun 2006/2007 menjadi 17506 pesantren.

Tabel 1.
Perkembangan Jumlah Pesantren Secara Nasional

Tahun	Tipe pesantren			Jumlah
	Salafiyah	Ashiriyah	Kombinasi	
2002/2003	8905	878	4284	14067
2003/2004	4692	3368	6596	14656
2004/2005	3184	4582	7032	14798
2005/2006	3991	3824	8200	16015

Sumber: Diolah dari <http://www.pendis.depago>

Berdasarkan kedinamisan dan adaptasi peran yang baik, sebagai lembaga pendidikan, pesantren juga mengalami perkembangan, sekarang banyak pesantren menyelenggarakan jenis pendidikan formal bahkan banyak pesantren yang mendirikan perguruan tinggi. Tabel 2 menyajikan pesantren yang menyelenggarakan pendidikan formal.

Tabel 2.
Pesantren yang Menyelenggarakan Pendidikan Formal Tahun 2006/2007

Koordinasi DEPAG			Koordinasi DEPDIKNAS		
Jenjang Pendidikan	Jumlah & prosentasi Pesantren	Jumlah & prosentasi Siswa/Santri	Jenjang Pendidikan	Jumlah & prosentasi Pesantren	Jumlah & prosentasi Siswa/Santri
RA	3.289 (20,5%)	153.017 (4,8%)	TK	1.548 (9,7%)	45.888 (1,4%)
MI	5.524 (32,8%)	381.515 (12%)	SD	3.856 (24,1%)	148.339 (4,6%)
MTs	8.063 (50,3%)	635.455 (19,9%)	SMP	5.366 (33,5%)	178.160 (5,6%)
MA	4.495 (28,1%)	265.461 (8,3%)	SMU	4.244 (26,5%)	95.475 (3%)
PTAI	1.479 (9,2%)	50.708 (1,6%)	PT	918 (5,7%)	17.923 (0,6%)

Sumber : diolah dari <http://dedenfaoz.wordpress.com>

Pesantren mampu memperluas peran sosial bagi komunitas sekitarnya. Dalam fungsi sosial ini, pesantren *me-respons* persoalan kemasyarakatan, seperti mengatasi kemiskinan, memelihara tali persaudaraan, mengurangi pengangguran, memberantas kebodohan, memelihara lingkungan, kehidupan yang sehat dan sebagainya. Pesantren Nurul Jadid, Paiton Probolinggo Jawa Timur, Pesantren An Nuqayah Guluk-guluk Sumenep Madura dan Pesantren Maslakul Huda, Kajen, Pati, Jawa Tengah dapat dijadikan contoh pesantren yang melakukan fungsi sosial (Haedari Amin, 2007).

Dalam kerangka era otonomi daerah, pesantren dituntut sebagai aktor *civil society* berpartisipasi mewujudkan *good local governance*. Peran pesantren akan mendukung proses

pembangunan daerah. Jika dikaitkan pemberdayaan masyarakat, memberdayakan pesantren dengan berbagai potensinya dapat berfungsi dan membantu menyelesaikan berbagai masalah sosial ekonomi masyarakat yang secara umum berada di pedesaan.³

PESANTREN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Selain sebagai lembaga pendidikan, pesantren umumnya dinyatakan berperan sebagai lembaga sosial dan dakwah. Pesantren mampu mempertahankan eksistensinya, bahkan antusias dan konsisten berperan aktif dalam pembangunan emansipatif partisipatif. Pesantren berfungsi sebagai pusat rencana swadaya masyarakat dan menjunjung pembentukan. Dalam usaha swadaya tersebut, pesantren berfungsi sebagai pangkal tolak dan dasar berpijak bagi organisasi swadaya dan digunakan oleh penduduk sebagai jawaban atas marginalisasi oleh negara (Ziemek, 1986: 178-179).

Tiga pendekatan penunjang pesantren sebagai faktor dinamis dari pembangunan masyarakat, antara lain: Pendekatan pembaharuan pengajaran, Program-program bantuan pemerintah dan Prakarsa dari organisasi swasta yang mengembangkan ilmu pengetahuan dalam kerja sama untuk merencanakan dan melaksanakan program pembangunan dalam bentuk swadaya partisipatif (Departemen P&K dalam Ziemek, 1986: 198). Di samping itu, cepat lambatnya masyarakat menerima ide pemberdayaan dari pesantren dipengaruhi: a) Kyai menjadi sumber informasi dipercaya dan dihormati. b) Tingkat ekonomi masyarakat desa masih rendah sehingga merasa akan mendapat banyak manfaat dari pemberdayaan dan c) Tidak bertentangan dengan nilai yang dianut oleh masyarakat sekitar (Sriharini, 2000: 76).

Studi Zubaidi (2007) tentang pemberdayaan masyarakat berbasis pesantren dengan kontribusi fiqh sosial⁴ dijelaskan pesantren mampu mengaktualisasikan gagasan fikih sosial dalam kegiatan pengembangan masyarakat dalam pemecahan berbagai masalah sosial yang dihadapi masyarakat. Optimalisasi peran sosial pesantren ini dilaksanakan melalui pembentukan Biro Pengembangan Pesantren dan Masyarakat (BPPM) (Zubeidi, 2007: 102), dengan kegiatan pembentukan dan fungsionalisasi kelompok swadaya masyarakat, penyuluhan, pelatihan, pengembangan koperasi, bantuan modal, hingga pendirian Bank Perkreditan Rakyat, serta upaya mendaur ulang limbah padat industri tepung tapioka (Zubeidi, 2007: 241-248).

Pesantren sebagai lembaga dengan potensi sumber daya dan integritas yang kuat di masyarakat mendukung pembangunan melalui pemberdayaan masyarakat terlebih dibidang ekonomi (Rahardjo (1985: xii) dan Wahid dalam Siradj, dkk (1999: 146-149). Sebagai landasan pustaka dalam studi ini, yaitu *good governance*, pemberdayaan, ekonomi rakyat, dan kelembagaan digunakan.

3. Sektor ekonomi rakyat pada umumnya masih menghadapi berbagai keterbatasan seperti pengembangan kemampuan penguasaan teknologi maupun mengakses modal dan pasar.
4. Berbagai kegiatan yang menyangkut urusan duniawiyah dan dipandang diluar urusan pesantren telah dipahami dan dilaksanakan sebagai suatu ibadah sosial. Fiqh sosial dimaknai pemahaman keagamaan yang menekankan pemenuhan ritualitas dan rutinitas ibadah serta dakwah yang bercorak sosial.

Good Governance menuntut kompatibilitas peran aktornya (pemerintah, swasta dan masyarakat) untuk menjawab kenyataan bahwa birokrasi pemerintah dalam menyelenggarakan urusan publik menjadi titik lemah ketika mengalami pembusukan baik yang bersifat struktural maupun kultural (seperti inefisiensi dan korupsi). Kelemahan ini memberi peluang bagi sektor swasta (pasar) untuk dapat menjadi instrumen alternatif dari hegemoni/otoritas Negara. Walaupun demikian, pasar juga seringkali mengalami distorsi, ketidakadilan dan diskriminasi terhadap lapisan masyarakat.⁵

Sulistiyani (2004:77) memaknai pemberdayaan⁶ sebagai suatu proses menuju berdaya, atau proses untuk memperoleh daya/kekuatan/kemampuan, dan atau peroses pemberian daya dari pihak yang memilki pemberdayaan kepada pihak yang kurang atau belum berdaya. Sumber inisiatif untuk berdaya bisa berasal dari masyarakat atau dari pihak lain yang memiliki kekuatan seperti pemerintah atau agen-agen pembangunan lain.

Ekonomi rakyat adalah kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh rakyat dengan secara swadaya mengelola sumber daya apa saja yang dapat dikuasainya, setempat dan ditujukan untuk memenuhi kebutuhan dasarnya beserta keluarganya (Mubyarto, 1997: 3). Sistem ekonomi kerakyatan adalah sistem ekonomi yang berbasis pada kekuatan rakyat.⁷ Pengembangan ekonomi rakyat menyelamatkan perekonomian nasional, seperti penyedia lapangan kerja, penyedia barang murah untuk konsumsi rakyat, efesiensi dan fleksibilitas untuk tetap bertahan hidup, dan sebagai penghasil *entrepreneur* baru (Rustiani, 1996: 4).

Pemberdayaan masyarakat erat kaitannya dengan pengembangan kelembagaan masyarakat.⁸ Adanya suatu lembaga yang dibentuk atau mempersamai suatu proyek atau program akan lebih menjamin keberlanjutan proyek atau program tersebut. Terlebih dalam mengkaji ekonomi rakyat. Rintuh dan Miar (2003: 3), menyatakan kelembagaan sebagai suatu norma/kaidah peraturan atau organisasi yang memudahkan koordinasi dalam membentuk harapan masing-masing yang mungkin dapat dicapai dengan saling kerja sama. Sementara secara mendasar Esman dalam Eston (1986:24) memberikan titik tolak pembangunan lembaga dengan defenisi :

“Pembangunan lembaga dapat dirumuskan sebagai perencanaan, penataan, dan bimbingan dari organisasi-organisasi baru atau yang disusun kembali yang mewujudkan perubahan-perubahan dalam nilai-nilai, fungsi-fungsi, teknologi-teknologi fisik, dan/atau sosial, menetapkan, mengembangkan, dan melindungi

5. Pesantren bahkan merupakan emberio *civil society* di Indonesia (Hikam, 2000: 120).

6. Walaupun ada banyak alasan tentang urgensi pemberdayaan, penerapan pemberdayaan masih menghadapi berbagai permasalahan terutama pengertian yang bias terhadap pengertian pemberdayaan masyarakat sebagai suatu paradigma baru pembangunan.

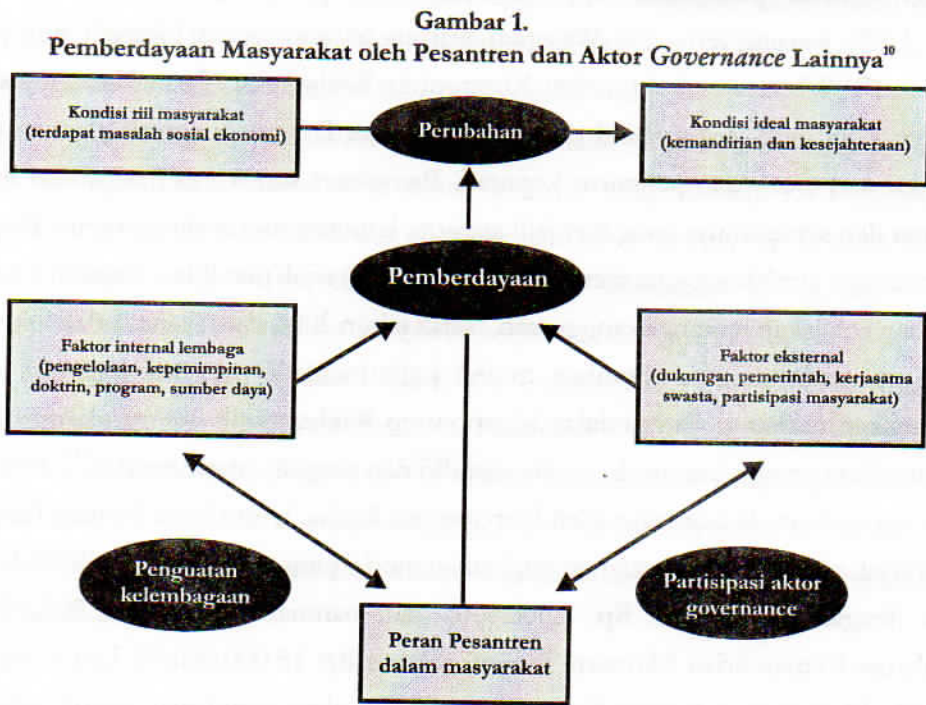
7. Mubyarto memberikan ciri-ciri ekonomi rakyat sebagai berikut: Dilakukan oleh rakyat tanpa modal besar; Dikelola dengan cara-cara swadaya; Bersifat mandiri sebagai ciri khasnya; Tidak ada buruh dan tidak ada majikan; Tidak mengejar keuntungan (Rintuh & Miar, 2003: 5).

8. Pengembangan kelembagaan penting karena bantuan teknis atau pendekatan proyek untuk melaksanakan pembangunan selama ini cenderung sebagai alat menguras dana proyek pembangunan yang sifatnya insidental tanpa mampu membangun masyarakat secara berkelanjutan. Sementara itu pemberdayaan masyarakat menekankan partisipasi masyarakat agar pembangunan dilaksanakan oleh mereka sendiri secara berkelanjutan.

hubungan-hubungan normative dan pola-pola tindakan yang baru, dan memperoleh dukungan dan kelengkapan dalam lingkungan tersebut.”

Dalam model pembangunan lembaga, Esman mengartikan lembaga sebagai suatu organisasi formal yang menghasilkan perubahan dan yang melindungi perubahan serta jaringan dukungan-dukungannya yang dikembangkan dalam lingkungan. Dalam hal ini tidak diartikan sebagai pola-pola kegiatan yang *normative* (seperti perkawinan, kontrak).⁹

Pesantren merupakan bagian *civil society* berpartisipasi dalam pembangunan. Partisipasi merupakan salah satu prinsip *good governance* serta mewujudkan tujuan otonomi daerah. Dalam mewujudkan kemandirian, masyarakat sektor ekonomi rakyat membutuhkan perhatian dan penguatan dari berbagai pihak, dalam hal ini pesantren diharapkan bisa berperan aktif melakukan pemberdayaan. Dalam kenyataannya, kemampuan beberapa pesantren melakukan pemberdayaan ini sangat dipengaruhi faktor baik internal maupun eksternal. Pesantren harus berusaha memperkuat kelembagaannya sehingga menjadi lembaga yang dapat berperan dalam pemberdayaan ekonomi rakyat dan memfungsikan dirinya untuk memenuhi berbagai kebutuhan atau mengatasi masalah sosial ekonomi masyarakat.



9. Dalam rumusannya, Esman memberi lima variabel lembaga, yaitu kepemimpinan, doktrin, program, sumber daya dan struktur intern (Esman dalam Eston, 1986: 24-25).

10. pemberdayaan ini dilakukan secara internal dan eksternal. Secara internal, obyek dari pemberdayaan disini adalah internal pesantren, yaitu unsur-unsur internal pesantren terutama santri, para pengurus, guru/ustadz dan kyai. Secara eksternal, obyek pemberdayaan adalah masyarakat secara umum. Sedangkan pesantren sendiri merupakan lembaga yang dimiliki oleh masyarakat. Artinya pesantren menjadi basis pemberdayaan tersebut sehingga akan terlihat bagaimana proses pemberdayaan dan pendekatan yang dilaksanakan oleh pesantren. Tegasnya, fungsionalisasi peran pesantren untuk melaksanakan pemberdayaan ekonomi terlihat dari berbagai program kegiatan yang melibatkan unsur internal pesantren dan masyarakat baik pada unit-unit usaha ekonomi, sosial maupun unit-unit pendidikan dan dakwah. Adanya berbagai unit usaha menunjukkan kemampuan pesantren menjalankan proses pemberdayaan secara nyata. Unit-unit pendidikan dan dakwah yang terlebih dahulu diperankan menunjukkan relevansi dan kemampuan pesantren melaksanakan proses penyadaran dan *capacity building* (dalam pengembangan sumber daya manusia).

Penelitian pemberdayaan masyarakat oleh pesantren ini dipilih secara sampel purposif pada pesantren Rasyidiyah Khalidiyah (Rakha) dan pesantren Nurul Fajeri Kabupaten Hulu Sungai Utara Propinsi Kalimantan Selatan dengan pendekatan kualitatif.¹¹ Pertama penelitian akan berfokus pada fungsionalisasi peran pesantren dalam pemberdayaan berdasarkan usaha ekonomi dan sosial yang dilakukan pesantren, Relevansi usaha/kegiatan pendidikan dan dakwah yang dilaksanakan pesantren dalam pemberdayaan ekonomi rakyat. Kedua, identifikasi faktor-faktor penentu pemberdayaan ekonomi rakyat, yaitu Pengelolaan dan Kepemimpinan pesantren, sumber daya, dukungan masyarakat dan dukungan pemerintah.

FUNGSIONALISASI PERAN PESANTREN DALAM PEMBERDAYAAN EKONOMI RAKYAT

1. Fungsionalisasi Peran oleh Pesantren Rakha (Rasyidiyah Khalidiyah)

Pesantren Rakha telah menyelenggarakan berbagai kegiatan dakwah dan pendidikan baik jalur non formal maupun jalur formal.¹² Pesantren ini juga telah melaksanakan berbagai usaha ekonomi yang melibatkan masyarakat, berupa Koperasi pondok pesantren (koppontren), usaha agribisnis dan perikanan. Koppontren Rakha mempunyai unit usaha yaitu usaha simpan pinjam (USP), warung serba ada (Waserda), warung telekomunikasi (Wartel), biro perjalanan dan wisata (BPW) serta usaha konveksi. Koppontren Rakha secara formal berdiri pada tanggal 23 Maret 1995 berdasarkan hasil musyawarah antara Dewan pengurus yayasan pesantren Rakha, Dewan Guru dan pengurus koperasi. Banyaknya santri dan masyarakat lingkungan pesantren dan sebagiannya yang menjadi anggota koperasi merupakan potensi Koppontren. Perkembangan jumlah anggota mengalami peningkatan sejak pendirian. Namun karena terjadi perubahan kebijakan tentang keanggotaan, sejak tahun 2006 santri yang sudah lulus tidak lagi di data menjadi anggota. Sumber modal juga menjadi penentu koperasi ini dalam melaksanakan usahanya. Permodalan Koppontren Rakha masih mengandalkan modal dari luar, sementara penggalan modal secara mandiri dari anggota masih rendah.¹³ Beberapa unit usaha yang mampu dilaksanakan oleh Koppontren Rakha. Unit Usaha Simpan Pinjam (USP) dimulai sejak tahun 1998 dengan memanfaatkan modal pinjaman dari PT.ASKES Kalimantan Selatan dengan modal awal Rp. 8.000.000,- dan bantuan modal dari P2KER (Proyek Peningkatan Kemandirian Ekonomi Rakyat) sebesar Rp. 15.000.000,00. Untuk menjalankan usaha ini, dikemukakan konsep “*nazar*”—peminjam akan membayar pokok pinjaman dan

11. Dua pesantren ini dipilih dari 32 pesantren, Pesantren Rakha dipilih dengan pertimbangan pesantren tersebut merupakan pesantren terbesar di kab. HSU. Pesantren ini berada di Desa Pakapuran Kecamatan Amuntai Utara. Sedangkan pemilihan pesantren Nurul Fajeri dengan pertimbangan bahwa pesantren ini terletak di sebuah desa yang dikelilingi oleh desa lainnya.
12. Pendidikan formal pesantren antara lain: MTs (Madrasah Tsanawiyah); MA (Madrasah Aliyah) dan STAI (Sekolah Tinggi Agama Islam)
13. Untuk tahun buku 2007, permodalan Koppontren RAKHA sebesar Rp 89.524.800, 00 terdiri dari modal internal (Sendiri) yaitu Simpanan Pokok Rp 1.029.500,00; Simpanan Wajib Rp 1.197.000,00 dan Donasi dari Yayasan Rp 2.298.300,00 dengan total Total 4.524.800. sedangkan Modal dari Luar adalah Proyek P2KER Rp 15.000.000, 00 sejak tahun 1998; Proyek Dana Bergulir BBM Rp 70.000.000, 00 sejak tahun 2000. (Sumber: LPJ Pengurus Koppontren Rakha Tahun 2007)

akan memberikan infaq pembayar nazar kepada Koppontren Rakha untuk digunakan bagi kebaikan ummat (nazar artinya janji untuk melakukan kebaikan yang wajib dipenuhi, dalam hal ini adalah memberi infaq). Usaha simpan- pinjam ini berjalan cukup baik, pada tahun 2007 nasabah peminjam di USP sejumlah 106 orang. Penambahan modal simpan pinjam ini banyak berasal dari Pemerintah.¹⁴ Terjadinya kelesuan ekonomi lokal yang dialami masyarakat mempengaruhi kemauan dan kemampuan pengembalian modal bahkan ada anggapan modal tersebut sebagai “uang pemberian pemerintah”. Untuk mengatasi masalah ini, pihak Koppontren Rakha melakukan pendekatan persuasif, yaitu dengan mendatangi rumah nasabah dan memberikan surat permintaan membayar sisa tunggakan utangnya tersebut.

Usaha agribisnis Pesantren Rakha adalah perkebunan karet sejak tahun 2006 dan dikelola secara mandiri terpisah dari unit usaha koperasi. Usaha ini terlaksana berkat terpilihnya Pesantren Rakha sebagai salah satu penerima Bantuan permodalan kepada LM3 (Lembaga Mandiri yang Mengakar di Masyarakat).¹⁵

Pesantren mampu melahirkan SDM dari penyelenggaraan pendidikan formal dan memberi bekal kemandirian bagi santri dari kegiatan pendidikan ketrampilan. Selain itu dakwah yang dilakukan oleh lembaga pesantren memberi pengaruh yang luas dalam memotivasi, memberi nilai dan norma kegiatan ekonomi masyarakat. Di pesantren ini proses pendidikan diarahkan pada pendidikan yang memberikan bekal keterampilan hidup kepada santrinya sehingga mampu melahirkan santri (alumni) yang mandiri. Di Pesantren Rakha terdapat beberapa program pendidikan keterampilan, yang terintegrasi dengan pendidikan formalnya. Program ini masih dilaksanakan secara insidental sesuai kebutuhan dan permintaan santri dan dilaksanakan dengan bekerjasama dengan lembaga luar seperti SMK (Sekolah Menengah Kejuruan) dan BLK (Balai Latihan Kerja).¹⁶ Catatan penting lainnya adalah dakwah pesantren untuk Pemberdayaan Ekonomi. Dakwah di masyarakat mempunyai pengaruh dalam memberdayakan ekonomi rakyat yaitu berupa proses motivasi terhadap kegiatan ekonomi masyarakat dan pelebagaan nilai/norma islam dalam praktek ekonomi. Kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh masyarakat pada dasarnya juga merupakan tuntutan dan diniatkan ibadah.

-
14. Pada bulan Desember tahun 2000 dari PKPS BBM (Program Kompensasi Pengurangan Subsidi Bahan Bakar Minyak) sebesar Rp 100.000.000,- Bantuan modal ini dapat dijalankan dengan cukup baik oleh pesantren dan cicilan pengembalian modal ke pemerintah dapat terpenuhi dengan baik pada tiga tahun pertama.
 15. Membeli lahan & kebun karet siap produksi seluas 3 Ha dengan tujuan segera mendatangkan hasil yang selanjutnya untuk modal pengembangan usaha. Lokasinya di desa Marindi kecamatan Haruai Kabupaten Tabalong. Lahan ini dikerjakan 3 orang tenaga kerja dari masyarakat sekitar dengan ketentuan bagi hasil rata. Berdasarkan data rekapitulasi penerimaan dan pengeluaran pesantren Rakha TA 2007/2008 dari hasil usaha ini, yayasan telah mendapat bagian sebesar Rp. 15.455.700,00. Membeli dan membuka lahan baru dengan menanam karet seluas 8 Ha. Lahan ini selanjutnya akan terus dikembangkan untuk budidaya penanaman karet. Lokasinya di desa Marias, kecamatan Juai Kabupaten Balangan. Untuk lahan ini pesantren membentuk kelompok pengelola yang terdiri dari 10 orang dari masyarakat sekitar sebagai pemelihara dan mekanisme bagi hasil rata.
 16. Program pembelajaran ketrampilan yang diberikan adalah Pertukangan/meubeler; Perikanan; Agribisnis; perkebunan karet); Tata boga; Tata busana; Sablon (sumber: Profil Pondok Pesantren Rakha 2006)

2. Fungsionalisasi Peran oleh Pesantren Nurul Fajeri

Pesantren Nurul Fajeri *concern* dalam memenuhi kebutuhan pendidikan masyarakat. Tidak hanya itu, pesantren ini melaksanakan kegiatan ekonomi dengan membangun Koppontren Nurul Fajeri dan membina anak-anak yatim, piatu atau kurang mampu dalam sebuah Panti Asuhan. Koppontren Nurul Fajeri secara formal berdiri pada awal tahun 1997. Pendirian koperasi untuk mewujudkan salah satu usaha yang harus dilaksanakan untuk mencapai tujuan sosial yayasan. Keanggotaan Koppontren Nurul Fajeri terdiri dari para santri, ustadz/guru, pengasuh, karyawan, dan masyarakat yang berada disekitar pesantren. Namun perkembangan jumlah anggotanya relatif lambat dalam beberapa tahun terakhir. Pesantren memperoleh modal usaha secara internal dari anggota dan secara eksternal dari pinjaman atau bantuan pihak luar.¹⁷ Unit usaha Koppontren Nurul Fajeri adalah Waserda/Pertokoan, Wartel dan *fotocopy*, serta usaha simpan pinjam (USP). Unit USP ini merupakan unit usaha yang paling berkontribusi dalam membantu perekonomian masyarakat. Usaha Simpan Pinjam dimulai pada tahun 2001 setelah adanya bantuan PKPS BBM (Program Kompensasi Pengurangan Subsidi Bahan Bakar Minyak) berbentuk kredit mikro. Pinjaman ini dilaksanakan dengan sistem nazar, sebagaimana dilaksanakan di Koppontren Rakha.¹⁸

Panti Asuhan Nurul Fajeri mulai dibentuk pada tahun 1989 saat tidak ada organisasi sosial di kecamatan Amuntai Utara. Panti Asuhan ini berhasil didirikan pada tanggal 13 Oktober 1991 dan saat penelitian dilakukan, pemimpin Panti Asuhan ini merupakan ketua pengurus yayasan pesantren Nurul Fajeri. Panti asuhan ini bergerak dibidang usaha kesejahteraan sosial dengan menyantuni dan membina anak yatim, piatu dan anak-anak terlantar.

Keberhasilan utama panti asuhan ini dalam konteks pemberdayaan masyarakat adalah kemampuan melakukan pemberdayaan dengan pendekatan *welfare*. Pesantren dalam hal ini berperan memberi bekal kemandirian bagi anak asuhnya. Pesantren terbukti berpotensi membantu mengatasi masalah pengembangan ekonomi masyarakat misalnya dengan memproduksi pakan ikan dengan harga yang lebih murah. Dalam konteks pemberdayaan masyarakat, keberadaan pendidikan yang diselenggarakan pesantren merupakan salah satu sarana yang efektif dalam melakukan penyadaran, memberi motivasi, serta membangun kapasitas masyarakat (*capacity building*).

-
17. Koppontren Nurul Fajeri masih banyak mengandalkan modal dari luar. Untuk penambahan modal tahun 2007, internal anggota hanya Rp. 800.000,- yaitu dari simpanan pokok Rp. 500.000,- dan simpanan wajib Rp. 300.000,-. Selebihnya mengembangkan modal bantuan yang sudah ada dari pemerintah terutama untuk usaha simpan pinjam yaitu dari bantuan Proyek Dana Bergulir PKPS BBM (dar Januari 2001) sebesar Rp. 100.000.000,- (sumber berdasarkan LPJ Pengurus tahun 2007, pen)
18. Dalam sistem ini, setiap peminjam yang meminjam uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) umumnya memberikan infaq nazarnya sebanyak Rp. 25.000/bulan, atau sekitar (2,5 %). Uang pinjaman diberikan oleh pihak koperasi tanpa agunan. Hal ini masih bisa dilakukan karena hubungan dimasyarakat masih saling kenal dan sudah saling percaya.

FAKTOR PENENTU FUNGSIONALISASI PERAN PESANTREN DALAM PEMBERDAYAAN EKONOMI RAKYAT KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

Terdapat beberapa faktor yang menentukan kemampuan pesantren untuk melaksanakan fungsionalisasi perannya dalam pemberdayaan ekonomi rakyat ini, yaitu pengelolaan dan kepemimpinan pesantren, sumberdaya manusia, dukungan masyarakat dan dukungan pemerintah.

Pesantren Nurul Fajeri dan Rakha termasuk pesantren berstatus lembaga milik institusi atau yayasan.¹⁹ Pesantren yang dikelola yayasan merupakan antisipasi terhadap sulitnya pengkaderan kyai pemimpin pesantren dan mempengaruhi aspek kelembagaan terutama dengan perubahan gaya kepemimpinan di pesantren.²⁰ Kepemimpinan tidak tersentralisasi dalam perumusan Doktrin²¹ dan Program pesantren, hal ini ditunjukkan oleh pesantren Rasyidiyah Khalidiyah dan Nurul Fajeri yang perumusan Doktrin dan Program disusun secara bersama sebagai tugas kolektif lembaga. Yayasan pesantren Rakha, misalnya telah memberikan aturan yang jelas dalam Anggaran Dasarnya pasal pasal 16 (ayat (2): “ *Pengurus wajib menyusun program kerja dan rancangan anggaran tahunan untuk disahkan pembina*”. Jadi program disusun secara kolektif oleh dewan pengurus dan kemudian ditetapkan dewan pembina.

Para pemimpin pesantren telah mempunyai kesadaran akan tugas pemberdayaan yang mereka pahami dari doktrin Islam, sehingga program yang dijalankan sebagai penerjemahan doktrin tadi juga dibuat secara kolektif. Namun dalam pemberdayaan ekonomi, program/kegiatan yang diselenggarakan pada dasarnya masih sebagai program yang bertujuan untuk mewujudkan kemandirian (internal) dan memberikan pelayanan. Secara eksplisit belum menjadi program pemberdayaan yang produktif dan masif. Temuan penting lainnya adalah perbedaan mekanisme pengarahannya operasional pesantren. Beberapa pemimpin Pesantren Rakha dalam pengurus yayasan lebih banyak berada di luar daerah, seperti menjadi anggota DPR RI dan anggota DPD Kalimantan Selatan. Meskipun demikian, karena kepemimpinan ini kolektif delegatif, tugas operasional tetap dapat berjalan. Interaksi pemimpin pesantren Rakha dengan dunia luar pesantren memberi keuntungan yaitu kemampuan mereka mengakses sumber dana dalam membangun dan mengembangkan pesantren. Sementara Pesantren Nurul Fajeri walaupun dikelola secara kolektif namun kepemimpinannya masih kharismatik. Pesantren Nurul Fajeri masih mengutamakan relasi dengan masyarakat sekitarnya sehingga memperkuat kepercayaan dan dukungan masyarakatnya.

19. Matsuhu (1994:73) membedakan dua status kelembagaan pesantren, yaitu pesantren milik pribadi dan pesantren milik institusi.

20. Dalam konsep kelembagaan, kepemimpinan merupakan unsur kelembagaan yang diartikan sebagai kelompok orang yang secara aktif berkecimpung dalam perumusan doktrin dan program lembaga serta mengarahkan berbagai operasi dan hubungan lembaga dengan lingkungannya (Easman dalam Eaton, 1986: 24).

21. Nilai agama, *pen*. Pengertian doktrin mengacu doktrin yang bersumber dari ajaran agama yang telah dikuasai dan diajarkan oleh para kyai dan ustadznya. Ada banyak nilai agama yang sangat kuat mendasari aktivitas di pesantren, terutama kewajiban menuntut ilmu dan berdakwah, kepedulian sosial dan urgensi kemandirian. Kepedulian merupakan tanggung jawab sosial yang menjadi fardu kifayah (wajib ada sebagian orang atau lembaga yang melaksanakannya).

Sumber daya manusia (SDM) pesantren menunjukkan secara kuantitatif memang tidak mengalami kekurangan SDM karena merupakan salah satu basis intelektual di masyarakat dan merupakan pencetak SDM itu sendiri.²² Namun secara kualitatif, menunjukkan kelemahan kompetensi SDM pesantren untuk berperan dalam pemberdayaan ekonomi karena cenderung *concern* dalam bidang agama dan pendidikan. Selain itu, ditambah kelemahan manajemen SDM dalam mengatur jabatan. Seseorang dianggap amanah ditunjuk menempati beberapa jabatan, seseorang menempati lebih dari satu posisi strategis.²³

Keterbatasan sumber modal dalam pengembangan usaha pesantren masih menjadi kendala. Pesantren masih mengandalkan dan membutuhkan bantuan pihak luar (terutama pemerintah). Selain dalam menghadapi tantangan masalah eksternal pengembangan usaha, kemampuan SDM Pesantren dalam memperoleh modal usaha juga berpengaruh. Untuk menjalankan berbagai unit usaha ekonomi, pengurus Kopontren dan unit usaha lainnya masih lebih mengandalkan bantuan modal dari pemerintah. Kemampuan menggali sumber dana secara internal dari para anggota koperasi atau melakukan kerjasama dengan pihak ketiga belum banyak.

Dukungan masyarakat merupakan kunci *survive* Pesantren. Dukungan tersebut berasal dari kepercayaan masyarakat terhadap pesantren dan terlihat jelas dari berbagai partisipasi masyarakat dalam membangun, menjalankan dan mengembangkan pesantren. Dukungan ini sangat mempengaruhi lahir, berkembang dan keberlanjutan pesantren secara umum dan dalam suatu program yang dijalankan pesantren secara khusus terutama dalam pemberdayaan. Masyarakat bagi pesantren ini merujuk pada masyarakat dilingkungan sekitar pesantren, para alumni (yang terjun/kembali kemasyarakat), dan organisasi antar pesantren yang ada di masyarakat. Dukungan Masyarakat Sekitar Pesantren ditunjukkan *pertama*, pemberian kepercayaan²⁴ dan sumbangan/bantuan dari masyarakat²⁵ dan *kedua*, keterlibatan langsung (partisipasi) dan kerjasama antar pesantren dan masyarakat—partisipasi dan kerjasama dalam program/kegiatan yang dijalankan pesantren. Dalam konteks pemberdayaan ekonomi, dibuktikan dalam keterlibatan masyarakat sebagai anggota koperasi dan bekerjasama dalam mengembangkan usaha koperasi. Keberhasilan memperoleh dukungan program pemberdayaan ekonomi masyarakat ini tergantung kebutuhan masyarakat, sosialisasi dan

22. SDM Pesantren Nurul Fajeri misalnya menjadi guru, pengelola koperasi dan pengurus panti asuhan sebagian besar merupakan masyarakat sekitar pesantren yang mempunyai integritas dimasyarakatnya dan mampu menghimpun potensi yang ada dan mengatasi berbagai masalah yang dihadapi tanpa bertabrakan dengan nilai, kepentingan dan kemampuan lingkungan/masyarakat.

23. Misalnya sekretaris yayasan pesantren Rasyidiyah Khalidiyah merangkap sebagai manajer agribisnis merangkap manajer perikanan. Sementara ketua pengurus koperasi pesantren Nurul Fajeri merangkap sekretaris yayasan dan sekretaris Panti Asuhan.

24. Kepercayaan dalam konteks ini merujuk pada kepercayaan masyarakat akan pesantren meliputi kepercayaan terhadap kemampuan pesantren menjalankan peran dan kepercayaan dalam mengelola sumber daya dan dana yang disumbangkan. Kepercayaan terhadap kemampuan menjalankan peran sangat jelas terlihat (terutama sebagai lembaga pendidikan) dari banyaknya anak yang disekolahkan dipesantren.

25. Dukungan finansial atau materi seperti sumbangan tanah, wakaf bahan bangunan dan sarana perlengkapan pesantren.

keterbukaan atau transparansi. Program kegiatan pemberdayaan dari pesantren akan mendapat dukungan yang kuat jika program kegiatan tersebut sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat, disosialisasikan dengan baik serta dikelola secara kolektif dan transparan. Dukungan masyarakat sekitar pesantren baik Pesantren Rasyidiyah Khalidiyah maupun pesantren Nurul Fajeri cukup kuat.

Keberadaan alumni pesantren yang telah tersebar di masyarakat sebenarnya mampu memberikan dukungan. Bukti potensi peran alumni ini terlihat jelas dari pendirian unit usaha BPW (Biro Perjalan dan Wisata) koperasi pondok pesantren Rasyidiyah Khalidiyah. Meskipun potensinya besar, peran alumni ini belum maksimal. Lebih lanjut, wadah alumni pesantren Rakha "IKA RAKHA" (Ikatan Alumni Rasyidiyah Khalidiyah) berperan secara sporadic—tergantung kebutuhan atau kegiatan tertentu dan umumnya berbentuk financial.

Bentuk organisasi antar pesantren memang belum ada di Kabupaten Hulu Sungai Utara. Kasi PEKAPONTREN²⁶ Depag Kab. HSU mengemukakan:

"...di daerah ini untuk mengumpulkan pesantren yang ada hanyalah dalam sebuah forum FKPPS (Forum Komunikasi Pondok pesantren Salafiah, pen). FKPPS merupakan sebuah forum komunikasi yang agendanya lebih banyak membahas tentang WAJARDIKDAS (Wajib belajar pendidikan dasar) 9 Tahun yang diselenggarakan pesantren salafiah (tradisional). Forum ini hanya diikuti oleh pesantren salafiah yang jumlahnya 13 buah pesantren dari 32 pesantren di Kabupaten Hulu Sungai Utara" (wawancara tanggal 11 Nopember 2008).

FKPPS merupakan forum komunikasi yang diinisiasi oleh Depag Kab. Hulu Sungai Utara. Forum ini berjalan cukup lancar karena dari pesantren mengirim perwakilan untuk mengikuti forum pertemuan di kantor Depag secara rutin tiap bulan. Sedangkan bentuk organisasi independen dibentuk oleh kalangan pesantren sendiri belum ada. Kesulitan pembentukan organisasi semacam ini disebabkan karena adanya anggapan bahwa seringkali organisasi sosial keagamaan ditunggangi oleh kepentingan politik tertentu.

Adapun dukungan pemerintah merupakan faktor yang juga menentukan keberhasilan fungsionalisasi peran pemberdayaan pesantren ini. Keterbatasan sumber daya pesantren dan masyarakatnya membutuhkan dukungan pemerintah. Sebaliknya pemerintah akan diuntungkan dari fungsionalisasi ini sebagai bentuk partisipasi masyarakat dalam mensukseskan pembangunan. Beberapa bantuan permodalan, pembinaan kelembagaan dan pengembangan usaha terbukti mampu menstimulan atau menopang keterbatasan sumber daya yang ada di pesantren. Selain dukungan Depag Kab.HSU, beberapa instansi pemerintah pusat lain cukup berperan seperti Kementerian Koperasi dan UKM misalnya telah membantu permodalan koperasi (bantuan TPUS tahun 2007) dan Departemen Pertanian memberikan permodalan LM3 tahun 2006 untuk usaha agibisnis karet di pesantren Rakha. Sedangkan dinas

26. Pendidikan Keagamaan dan Pondok Pesantren

pemerintah daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara adalah dinas perindustrian, perdagangan, dan koperasi (Perindagkop) dan dinas pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan sosial (Pembermaskesos) khusus pembinaan panti asuhan Nurul Fajeri.

TAWARAN MODEL PEMBERDAYAAN EKONOMI RAKYAT BERBASIS PESANTREN

Berdasarkan kondisi riil pesantren dan masyarakatnya pada pesantren Rakha dan Nurul Fajeri, tawaran model Pemberdayaan Ekonomi Rakyat Berbasis Pesantren diharapkan bisa berkembang sesuai keragaman pesantren yang ada. Peningkatan kemampuan masyarakat bidang ekonomi harus berkelanjutan dan perlu kelembagaan yang mengawal. Dalam hal ini, Pemerintah daerah dapat mengandalkan kelembagaan masyarakat sendiri dari pada menciptakan kelembagaan baru, yaitu pesantren.

Upaya melakukan pemberdayaan ekonomi kerakyatan berbasis pesantren bervisi *"Meningkatnya keberdayaan ekonomi masyarakat secara berkelanjutan melalui peran pesantren untuk mewujudkan kesejahteraan."* Visi bermakna peningkatan keberdayaan ekonomi masyarakat sebagai suatu proses untuk mewujudkan kesejahteraan. Kesejahteraan merupakan hasil akhir. Pemerintah tidak harus memberikan kesejahteraan secara instan, namun yang lebih penting adalah pemerintah membantu proses yang dijalankan masyarakat dalam mencapai kesejahteraan yang mereka inginkan. Hal ini harus diwujudkan secara berkelanjutan dan karenanya membutuhkan satu mekanisme yang terlembaga atau adanya kelembagaan yang mengawalnya (pesantren).

Terdapat dua misi yang dibawa yaitu *"Mengembangkan kemampuan masyarakat untuk mengembangkan potensi ekonomi dan mengatasi berbagai masalah kegiatan ekonomi secara mandiri melalui peran pesantren."* Dan *"Meningkatkan partisipasi sinergis antara pesantren dengan pemerintah dan pihak swasta untuk mewujudkan kesejahteraan bersama melalui pemberdayaan ekonomi rakyat."* Misi pertama merujuk pengembangan peran pesantren dalam memberdayakan ekonomi masyarakat. Kegiatan ekonomi pesantren dan kegiatan ekonomi di masyarakat akan membentuk hubungan *simbiosis mutualisme*. Keduanya akan saling memanfaatkan dan memberi manfaat. Pesantren dengan berbagai unsur kelembagaannya bersama masyarakat akan secara swadaya berusaha mengembangkan potensi ekonomi mereka dan mengatasi berbagai tantangan, kendala yang dihadapi. Misi kedua merujuk tuntutan usaha memperkuat peran dan partisipasi semua unsur *governance* dalam mewujudkan kesejahteraan bersama dengan meningkatkan partisipasi dan memperkuat kemitraan mereka.

Bagi pemerintah daerah, pemberdayaan ekonomi rakyat berbasis pesantren ini dapat diformulasi menjadi suatu program yang terintegrasi dalam kerangka kebijakan pemberdayaan ekonomi kerakyatan. Program ini dapat melibatkan instansi terkait dalam rangka ekonomi kerakyatan yang *bottom up* dan sangat partisipatif. Berikut beberapa poin penting yang menjadi dasar dalam format model pemberdayaan ini:

- Tujuan pemberdayaan adalah proses meningkatkan keberdayaan rakyat dan kesejahteraan rakyat merupakan hasil yang akan mereka peroleh dari keberdayaan tersebut.
- Sasaran dalam pemberdayaan ini adalah pesantren dan masyarakat lingkungan sekitar pesantren. Penentuan kelompok sasaran dilakukan dengan pendekatan *bottom-up*, pesantren mengetahui untuk siapa kegiatan pemberdayaan dilaksanakan. Pesantren dan masyarakat menjadi objek sekaligus subjek dalam pemberdayaan.
- Strategi perencanaan partisipatif antara pesantren dan masyarakat yaitu bersama-sama membuat rencana program kegiatan yang paling sesuai dengan kebutuhan mereka. Perlu juga adanya suatu mekanisme atau forum komunikasi yang baik terutama dari pemerintah daerah.
- Pelaksana atau peran tiap aktor saling melengkapi.
- Pengorganisasian program pemberdayaan fleksibel sesuai jenis kegiatan yang dilaksanakan dengan tetap menjadikan pesantren sebagai basis kelembagaan.
- Pembiayaan pemerintah daerah berdasarkan kebutuhan di masyarakat pesantren yang dikalkulasi secara bersama-sama.
- Untuk *sustainability exit strategy* mengandalkan kelembagaan pesantren dalam pemeliharaan bantuan dan substitusi/kaderisasi sumber daya manusia terlatih.

Kemampuan pesantren Rakha dan Nurul Fajeri melakukan kegiatan ekonomi menunjukkan kondisi penting yang harus dipenuhi agar dapat menjadi sebuah model pemberdayaan yang efektif, yaitu:

a. Syarat bagi Pesantren dan Masyarakat

- 1) Terpenuhinya syarat kesadaran dan komitmen para pemimpin pesantren melakukan peran pemberdayaan yang ditunjukkan dengan nilai memberi manfaat dan pelayanan bagi masyarakat, namun perlu peningkatan komitmen yang dibuktikan dalam penyusunan program-program pemberdayaan ekonomi.
- 2) Ketersedian sumber daya manusia pesantren cukup banyak, namun secara kualitatif, kompetensi untuk melakukan peran pemberdayaan harus ditingkatkan
- 3) Pesantren harus mendirikan unit usaha kegiatan ekonomi. Usaha ekonomi inilah menjadi pintu masuk proses pemberdayaan bagi masyarakat dan menjadikan pesantren sebagai basisnya.
- 4) Keterbukaan masyarakat menerima ide dan kerjasama dengan berbagai pihak. Hal ini sangat tergantung dari interaksi pesantren dan masyarakatnya serta hubungan dengan Pemerintah daerah.
- 5) Terdapat kebutuhan masyarakat akan penguatan (bantuan) “pihak luar”; seperti kekurangan modal, kurangnya keterampilan, sulitnya pemasaran, lemahnya kualitas produk dan sebagainya.

b. Syarat bagi Pemda dan Pihak Swasta

- 1) Komitmen dan perhatian pemerintah daerah menyediakan alokasi anggaran melaksanakan model pemberdayaan ini.
- 2) Koordinasi dan kerjasama antar unit instansi pemerintah daerah.
- 3) Kesediaan pihak swasta bekerjasama membantu kegiatan ekonomi masyarakat. Dalam hal ini pihak Pesantren mendukung secara kolektif proses kerjasama masyarakat dengan pihak swasta.

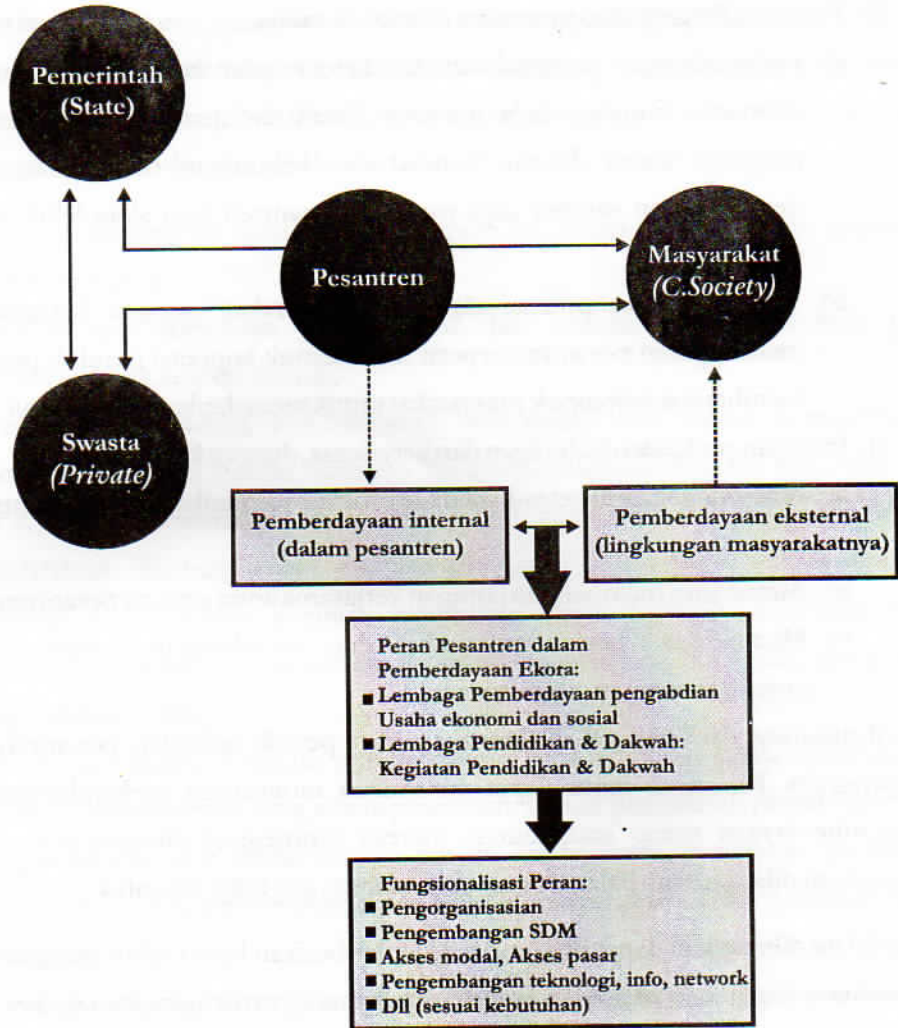
Untuk operasionalisasi model pemberdayaan ini, tahap dan program kegiatan harus dilalui dan dilaksanakan:

- a. Inisiasi dan Sosialisasi yang berasal dari kesadaran bersama baik pesantren (masyarakat) maupun Pemda.
- b. Perencanaan kolektif. Pembentukan mekanisme atau forum komunikasi antara pesantren dengan Pemda, misalnya Forum Komunikasi Pondok Pesantren Salafiyah (FKPPS). Promotor birokrasi yang relatif netral dapat mencegah kekhawatiran politisasi forum atau organisasi antar pesantren. Pesantren dapat mengkomunikasikan aspirasi kebutuhan atau masalah masyarakat dengan pemerintah. Hasilnya penentuan program kegiatan pemberdayaan apa yang paling tepat dilaksanakan.
- c. Pengorganisasian Program pemberdayaan yang telah disepakati yang disesuaikan dengan kelembagaan yang ada di pesantren. Untuk penyaluran permodalan misalnya dapat melalui unit usaha simpan pinjam koppontren, pemasaran produk melalui peran Waserda, pembentukan kelompok masyarakat dapat berdasar kelompok pengajian.
- d. Pelaksanaan program kegiatan pemberdayaan sesuai kebutuhan masyarakat. Program kegiatan ini secara bersama dijalankan oleh pemda melalui peran aktif pesantren dan masyarakat serta partisipasi pihak swasta. Program dan kegiatan yang bisa diterapkan didalamnya, adalah sebagai berikut:
 - 1) Program penguatan kemampuan kelembagaan pesantren untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat. Kegiatan yang dilaksanakan adalah:
 - a). Peningkatan kapasitas kelembagaan pesantren sisi kompetensi sumber daya manusia secara mandiri oleh pesantren maupun bekerjasama dengan pemerintah daerah seperti dalam melaksanakan diklat keterampilan usaha.
 - b). Peningkatan peran usaha ekonomi pesantren bagi masyarakat, melalui:
 - Inventarisasi potensi pengembangan ekonomi pesantren
 - Inventarisasi kendala pengembangan ekonomi pesantren yang telah dijalankan

- Melakukan pembinaan dan memberi bantuan produktif dan stimulan
 - Membuka partisipasi masyarakat dalam kegiatan ekonomi pesantren
 - Memanfaatkan produk masyarakat dalam usaha ekonomi pesantren.
- 2) Program Peningkatan pendayaan ekonomi masyarakat melalui pesantren :
- a). pengembangan pengetahuan dan keterampilan masyarakat dalam kegiatan ekonomi. Sumber daya manusia Pesantren mampu mengkomunikasikan program sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakatnya. Bahkan dengan peran sumber daya manusia Pesantren juga akan lebih efisien bagi pemerintah.
 - b). Melembagakan potensi ekonomi masyarakat menjadi kekuatan kolektif melalui peran pesantren seperti membentuk koperasi pondok pesantren dan membentuk kelompok masyarakat untuk menjalankan suatu usaha.
- 3). Program perkuatan hubungan dan kerjasama, dengan kegiatan:
- a) Menginisiasi dan menjadi mediator forum komunikasi antar pesantren dengan Pemda.
 - b) Membantu membangun jaringan kerjasama antar sesama pesantren.
 - c) Memperkuat posisi masyarakat dan membangun kemitraan ekonomi pesantren dengan pihak swasta.
- e. Monitoring dan evaluasi dilaksanakan oleh pemda terhadap pesantren penerima program. Pesantren tentu dapat melakukan monitoring perkembangan kegiatan pemberdayaan setiap saat, karena mereka terintegrasi dimasyarakat. Sedangkan evaluasi dilaksanakan dalam forum komunikasi yang telah dibentuk.

Model ini diharapkan dapat dijalankan dan memberikan hasil efektif dengan komitmen dan kerjasama setiap pihak: pesantren dan masyarakatnya, pemerintah daerah dan partisipasi pihak swasta.

Gambar 2.
Fungsionalisasi Peran Pesantren dalam Model Pemberdayaan
Ekonomi Rakyat Berbasis Pesantren.



PENUTUP

Terdapat catatan bahwa berdasarkan penjabaran di atas, beberapa poin dengan penelitian ini belum dapat dijelaskan—namun hal ini dapat dikembangkan oleh penelitian berikutnya sebagai bagian dalam kajian administrasi publik. Poin pertama adalah evaluasi program pemerintah yang melibatkan pesantren dalam pemberdayaan masyarakat, poin kedua tentang hubungan antara pesantren dengan pemerintah di daerah-daerah. Kajian-kajian ini diharapkan sebagai bagian upaya sinergi kekuatan dalam pembangunan. Penelitian ini pada akhirnya mendukung kemampuan pesantren menerjemahkan nilai agama kepada amal sosial yang konkrit, menyelesaikan masalah sosial ekonomi masyarakat hingga kemampuan pesantren dalam melakukan kegiatan dan membangun mekanisme pemberdayaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Irwan, dkk (editor), 2008, *Agama, Pendidikan Islam dan Tanggung Jawab Pesantren*. Yogyakarta, Pustaka Pelajar
- Depag, Dirjen Kelembagaan Agama Islam, 2003, *Pondok Pesantren dan Madrasah Diniyah, Pertumbuhan dan Perkembangannya*. Jakarta: Depag
- Dhofier, Zamakhsyari, 1983, *Tradisi Pesantren Studi Tentang Pandangan Hidup Kyai*, Cet ke 2, Jakarta, LP3ES.
- Eston, Joseph. W, (Penerjemah Pandan Guritno & Aldi Jeni), 1986, *Pembangunan Lembaga dan Pembangunan Nasional dari Konsep ke Aplikasi (Institution Building and Depelopment: From Concepts to Application)*, Jakarta, Universitas Indonesia
- Hikam, Muhammad A.S, 2000, *Islam, Demokratisasi, dan Pemberdayaan Civil Society*, Jakarta, Erlangga.
- Matsuhu, 1994, *Dinamika Sistem Pendidikan Pesantren*, Jakarta, INSIST
- Mubyarto, 1997, *Ekonomi Rakyat, Program IDT dan Demokrasi Ekonomi Indonesia*. Yogyakarta, Aditya Media
- Prijono, & Pranaka, 1996, *Pemberdayaan: Konsep, Kebijakan dan Implementasi*, Jakarta, Centre for Startegic and International Studies (CSIS).
- Rahardjo, M. Dawam.(Ed), 1985, *Pergulatan Dunia Pesantren, Membangun dari Bawah*, Jakarta, Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat (P3M).
- Rintuh, Cornelis, & Miar, 2003, *Kelembagaan dan Ekonomi Rakya*, Yogyakarta, UGM
- Rustiani, Frida (editor), 1996, *Perkembangan Ekonomi Rakyat dalam Era Globalisasi: Masalah, Peluang dan Strategi Praktis*, Bandung & Jakarta, Yayasan AKATIGA- YAPIKA
- Sasono, Adi, dkk, 1998, *Solusi Islam atas Problematika Umat (Ekonomi, Pendidikan dan Dakwah)*, Yakarta, Gema Insani Press
- Siradj, Said Aqil, dkk, 1999, *Pesantren Masa Depan*, Bandung, Pustaka Hidayah Sriharini, 2000, *Pondok Pesantren dan Pemberdayaan Masyarakat, Tesis*, Yogyakarta, UGM.
- Sulistiani, Ambar Teguh, 2004, *Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan*, Yogyakarta, Gava Media.
- Sumodiningrat, Gunawan, 1999, *Pemberdayaan Masyarakat dan Jaring Pengaman Sosial*, Jakarta, PT.Gramedia Pustaka Utama
- Utomo, Warsito, 2006, *Administrasi Publik Baru di Indonesia*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar
- Ziemek, Manfred, penerjemah Soendjojo, B.B, 1986, *Pesantren dalam Perubahan Sosial (Pesantren Islamische Bildung In Sozielen Wandel)*, Jakarta, P3M
- Zubaidi, 2007, *Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Pesantren Kontribusi Fiqih Sosial Kiai Sabal Mahfudh dalam Perubahan Nilai-Nilai Pesantrem*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar

Internet

<http://www.pendis.depag.go.id/DokPdf/pont/ Daftar Identitas Pondok Pesantren Tahun 2006-2007> diakses 8 Mei 2008

<http://dedenfaoz.wordpress.com/2007/12/21/statistik-pondokpesantren/> statistik pondok pesantren diakses 30 April 2008

Haedari, Amin. 2007. *Perluasan Peran Pesantren*. Diakses di: <http://opinibebas.epajak.org/pendidikan/perluasan-peran-pesantren-164/> tanggal 3 Juli 08.